BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengauditan

Menurut Hery (2017), pengauditan merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Arens & Loebbecke (2009) *auditing* adalah pengumpulan dan pengevaluasian dari bukti-bukti mengenai informasi entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dimaksud dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Tujuan Pengauditan

Dalam Standar Audit 200 (2021) menjelaskan secara umum tujuan audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Standar Audit 200 juga menjelaskan tujuan auditor secara keseluruhan, yaitu:

1. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana yang seharusnya dalam standar audit, berdasarkan temuan auditor.

Nariman dan Alan (2021) mengemukakan tujuan audit atas akun kas dan setara kas yaitu:

1. Untuk memastikan bahwa saldo kas dan setara kas pada akhir periode adalah benar milik perusahaan yang telah dicatat baik penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Untuk memastikan perusahaan memiliki pengawasan internal yang cukup dan terkendali, serta terdapat batasan penggunaan saldo kas dan setara kas.
3. Konversi saldo kas dan setara kas dalam valuta asing dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.3 Jenis Audit

Audit memiliki beberapa jenis seperti yang dinyatakan oleh Arens, dkk (2017), yaitu:

1. Audit Operasional (*operational audit*) mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode operasi. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen mengharapakan rekomendasi untuk mengembangkan operasi. Pada audit operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lain yang auditor kuasai.
2. Audit Kepatuhan (*compliance audit*) dilakukan untuk menyatakan apakah pihak yang diaudit mematuhi prosedur, aturan, atau regulasi yang ditetapkan pihak dengan otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan kebanyakan berupa laporan kepada manajemen dibanding pengguna luar, karena manajemen merupakan pihak utama yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur. Umumnya mereka yang bekerja untuk audit ini ialah auditor yang sudah bekerja lama pada unit organisasi yang bersangkutan.
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai kriteria yang berlaku. Dalam menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah ada kesalahan material dan kesalahan penyajian lain.

Audit dilaksanakan oleh auditor eksternal yang merupakan pihak independen yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa *management letter* yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.

2.1.4 Standar Audit

Kualitas pelaksanaan audit dapat diukur melalui penerapan standar audit yang berlaku. Standar audit adalah ukuran mutu minimal yang harus dipenuhi auditor dalam melaksanakan tugasnya, agar hasil audit dapat diandalkan oleh pihak yang berkepentingan (Agoes, 2017). Standar ini berlaku bagi seluruh audit yang dilakukan oleh auditor independen dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bentuk Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Secara umum, standar audit dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Standar Umum

Berdasarkan SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, standar umum meliputi:

1. Audit harus dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi serta pelatihan teknis yang memadai.
2. Auditor harus menjaga sikap independen dalam setiap tahap penugasan, baik secara fakta maupun penampilan.
3. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan penuh kehati-hatian (*due professional care*) selama pelaksanaan audit dan penyusunan laporan.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

Pada SA 300 dan SA 315, standar pekerjaan lapangan meliputi:

1. Perencanaan audit harus disusun secara memadai, termasuk penentuan strategi dan lingkup audit.
2. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika auditor menggunakan asisten, maka pekerjaan tersebut harus disupervisi secara tepat.

3. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan prosedur pengujian yang tepat.
4. Bukti audit yang cukup dan tepat harus diperoleh melalui prosedur seperti inspeksi, observasi, permintaan keterangan, dan konfirmasi.

c) Standar Pelaporan

Berdasarkan SA 700, SA 705, dan SA 706, standar pelaporan mencakup:

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
2. Laporan auditor harus mengungkapkan ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi jika terjadi perbedaan antara periode berjalan dan periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dinilai memadai. Jika terdapat kekurangan, auditor harus memberikan pernyataan yang sesuai.
4. Laporan auditor harus berisi opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan jika opini tersebut tidak dapat diberikan, disertai alasan yang jelas.

Dengan penerapan standar audit secara konsisten, auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.1.5 Prosedur Audit Kas

Prosedur audit merupakan teknik atau metode yang digunakan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam memberikan opini atas laporan keuangan (Whittington & Pany, 2019). Menurut Lestari dan Anwar (2020), prosedur ini harus dilakukan secara sistematis agar dapat mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, serta menguji keandalan data yang disajikan. Berbagai prosedur audit umum yang digunakan meliputi inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan ulang, penelaahan dokumen,

pelaksanaan ulang, prosedur analitis, dan proses audit lain menggunakan komputer.

Dalam pelaksanaan audit, penerapan prosedur audit yang tepat pada setiap akun sangat penting untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan. Akun kas, sebagai aset paling likuid dan rentan terhadap risiko salah saji, memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan prosedur audit. Oleh karena itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit kas secara terencana dan sistematis untuk memastikan saldo kas yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Prosedur audit atas akun kas dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pemahaman dan Evaluasi Pengendalian Internal

Auditor harus terlebih dahulu memahami dan mengevaluasi pengendalian internal terkait kas yang diterapkan entitas. Hal ini sesuai dengan ISA 315 yang mengharuskan auditor mengidentifikasi risiko salah saji material melalui pemahaman terhadap sistem pengendalian (IAASB, 2019). Pengendalian yang efektif memungkinkan auditor menentukan prosedur audit substantif yang tepat dan efisien.

b. Konfirmasi Saldo Kas

Auditor melakukan permintaan konfirmasi langsung kepada bank untuk memverifikasi saldo kas secara eksternal sesuai dengan ketentuan ISA 505. Bukti konfirmasi ini merupakan bukti audit independen yang sangat penting dalam mendukung keberadaan saldo kas (International Auditing and Assurance Standards Board, 2019).

c. Pemeriksaan Rekonsiliasi Bank dan Penghitungan Kas Fisik

Pemeriksaan rekonsiliasi bank yang disusun oleh klien bertujuan untuk memastikan kesesuaian saldo kas perusahaan dengan laporan bank dan mengidentifikasi perbedaan yang belum dijelaskan. Selain itu, auditor melakukan penghitungan kas fisik pada akhir periode untuk memastikan kas tunai sesuai dengan catatan akuntansi.

d. Penelusuran Dokumen Transaksi Kas dan Pengujian *Cut-off*

Auditor memeriksa bukti transaksi kas masuk dan keluar untuk memastikan pencatatan yang lengkap dan tepat waktu. Pengujian *cut-off*

diterapkan untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang sesuai, mencegah salah saji temporal (Arens et al., 2017).

e. Prosedur Analitis

Auditor membandingkan saldo kas dan aktivitasnya dengan periode sebelumnya serta anggaran untuk mendeteksi fluktuasi yang tidak biasa yang mungkin menunjukkan risiko kesalahan atau kecurangan. Jika ditemukan anomali, auditor melakukan prosedur tambahan (International Auditing and Assurance Standards Board, 2019).

f. Evaluasi Bukti Audit dan Penyusunan Opini

Setelah seluruh prosedur dilaksanakan, auditor mengevaluasi kecukupan dan keandalan bukti audit yang diperoleh. Penilaian ini menjadi dasar bagi auditor dalam memberikan opini atas kewajaran saldo kas sesuai dengan ISA 700 (International Auditing and Assurance Standards Board, 2019).

Dengan mengikuti prosedur audit kas secara terstruktur dan berlandaskan standar internasional, auditor dapat memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi kas yang benar dan bebas dari salah saji material.

2.1.6 Pengertian Kas

Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan beserta surat berharga lainnya, termasuk saldo di bank seperti rekening koran dan deposito atau tabungan, yang dapat segera atau dalam waktu singkat dicairkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran (Nuriyani & Rachma, 2017). Sebagai aset yang paling mudah dialihkan menjadi bentuk aset lain, kas juga bersifat mudah dipindahkan dan disembunyikan, sehingga menjadi sangat menarik bagi pihak yang berniat melakukan manipulasi atau kecurangan (Halim, 2015).

Menurut PSAK No. 2 (2014), kas didefinisikan sebagai pembayaran dalam bentuk uang tunai yang biasa digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kas mencakup saldo kas fisik (*cash on hand*) serta rekening giro. Sementara itu, setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi jangka pendek yang mudah dan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas

jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi jangka panjang atau kepentingan lain. Karena sifatnya yang sangat likuid dan menarik, kas termasuk aset lancar yang rentan terhadap penyalahgunaan maupun kecurangan.

2.1.7 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah memperoleh izin resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Republik Indonesia, 2011). Undang-undang ini mengatur bahwa KAP berfungsi sebagai penyedia jasa profesional di bidang akuntansi publik yang meliputi kegiatan audit, konsultasi, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan (Republik Indonesia, 2011). Dengan kata lain, KAP merupakan organisasi yang memfasilitasi praktik akuntan publik untuk memberikan layanan yang bersifat independen dan profesional (Cristansy & Aloysia, 2018).

Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Laporan yang telah diaudit oleh KAP menjadi sumber informasi yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, serta pihak-pihak lain yang bergantung pada informasi tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan berbasis fakta (International Federation of Accountants, 2021). Dengan memberikan opini yang independen dan objektif terhadap kewajaran laporan keuangan, KAP membantu menciptakan kepercayaan pasar dan mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk menjaga kualitas dan kredibilitas hasil audit, KAP wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip independensi dan objektivitas dalam setiap tahap pelaksanaan jasa profesionalnya.

2.2 Tinjauan Kajian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa kajian teori terdahulu yang relevan dengan cakupan pembahasan penulis yaitu prosedur audit kas:

Tabel 1 Tinjauan Kajian Terdahulu

No	Pengkaji dan Tahun Kajian	Hasil Kajian dan Relevansi dengan Kajian Penulis
----	---------------------------	--

1.	Rah A (2024)	<p>Judul: Analisis Prosedur Audit Kas dan Setara Kas oleh KAP Purba Lauddin dan Rekan.</p> <p>Hasil: Prosedur audit sudah sesuai standar audit yang berlaku dan efektif dalam mengidentifikasi kesalahan pencatatan.</p> <p>Relevansi: Memberikan gambaran prosedur audit kas yang sesuai dengan standar</p>
2.	Mutia Rahma (2022)	<p>Judul: Prosedur Audit Akun Kas dan Setara Kas PT CSN Klien KAP Suryadi dan Rizal</p> <p>Hasil: Menegaskan pentingnya pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan kas.</p> <p>Relevansi: Menjadi referensi penting mengenai pengendalian internal dan bagaimana prosedur audit kas diimplementasikan.</p>
3.	Dra. Suhartati & Rekan (2023)	<p>Judul: Analisis Prosedur Audit atas Akun Kas</p> <p>Hasil: Mengidentifikasi bahwa prosedur audit kas belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui perhitungan rasio untuk meminimalisir risiko salah saji.</p> <p>Relevansi: Memberikan pemahaman</p>

		mengenai tantangan prosedur audit kas.
--	--	--

2.3 Kerangka Berpikir

Akun kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kecurangan, karena sifatnya yang sangat likuid dan sering dipergunakan dalam transaksi sehari-hari. Untuk memastikan kewajaran saldo kas yang disajikan dalam laporan keuangan, diperlukan pelaksanaan audit yang menyeluruh dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Pentingnya hal tersebut, penulis memilih untuk melakukan studi praktik di Kantor Akuntan Publik Drs. Inaresjz Kemalawarta dengan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui pemahaman auditor terhadap sistem pengendalian internal klien terkait transaksi kas, perencanaan prosedur audit yang relevan untuk akun kas, pelaksanaan prosedur audit seperti pengujian rekonsiliasi bank, pemeriksaan kas secara fisik, konfirmasi saldo bank, serta pengujian dokumen pendukung transaksi kas, dan evaluasi atas hasil temuan selama pengujian kas, dan dampaknya terhadap opini auditor. Dengan kajian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara akademis maupun praktis, dalam bidang auditing, khususnya terkait pengujian akun kas.

Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir